

**BAB II**  
**FAKTOR SOSIAL POLITIK DAN SERTA SEJARAH**  
**INDONESIA-RUSIA**

Representasi adalah proses memberikan makna atau penafsiran ulang terhadap suatu objek, fenomena, atau realitas. Keseluruhan pemahaman tentang objek, fenomena, dan realitas tersebut bergantung pada cara individu atau kelompok melihat dan menafsirkan kembali atau mengungkapkannya melalui bahasa. Pengetahuan juga memiliki peran yang signifikan dalam melakukan representasi terhadap objek, fenomena, dan realitas tersebut, yang pada akhirnya akan membentuk konsep dan ideologi baru yang terkait dengan budaya serta cara pandang individu dan kelompok tersebut.

Dalam konteks hubungan internasional, representasi merujuk pada cara suatu negara atau aktor internasional mewakili atau menafsirkan dirinya sendiri, negara atau aktor lain, dan realitas internasional secara umum. Representasi suatu aktor terhadap aktor lainnya dapat dipengaruhi dari faktor-faktor tertentu. Dalam pandangan post-strukturalis, representasi ini dapat dipengaruhi dari beberapa faktor seperti sejarah, sosial, politik, dan budaya. Sehingga dalam Bab 2 ini penulis menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi representasi masyarakat Indonesia terkait peristiwa operasi militer Rusia-Ukraina berupa faktor sejarah, sosial, politik, serta budaya.

## **2.1 Faktor Sosial Politik Indonesia dan Rusia**

### **2.1.1 Sosial Politik Negara Indonesia**

Negara Indonesia, atau secara resmi dikenal sebagai Republik Indonesia, merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di wilayah Asia Tenggara, tepatnya di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Mempunyai lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari barat hingga timur, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman geografis dan budaya yang luar biasa. Indonesia dikenal akan kekayaan alamnya, termasuk hutan hujan tropis, gunung berapi, pantai-pantai yang indah, serta keanekaragaman hayati yang kaya (detikedu, 2021a).

Selain kekayaan alamnya, keragaman budaya Indonesia juga merupakan aspek khas yang memikat. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis serta bahasa yang berbeda-beda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sejak tahun 1991 hingga 2019, telah diidentifikasi dan dikonfirmasi terdapat setidaknya 718 bahasa daerah di Indonesia, yang berasal dari 2.560 daerah pengamatan (dialek dan sub dialek tidak termasuk). Selain itu, berdasarkan dari laman kemlu.go.id, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai 360. Hal tersebut menjadi perpaduan yang unik serta membuat Indonesia memiliki keragaman tradisi dan budaya yang sangat kaya.

Agama juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Negara ini terkenal dengan keragaman agamanya, serta kebebasan dalam beragama juga dijamin oleh konstitusi negara tersebut. Keragaman ini mencerminkan budaya dan sejarah Indonesia. Terdapat enam

agama resmi yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pada akhir tahun 2021, sekitar 238,09 juta individu atau sekitar 86,93% dari populasi Indonesia adalah penganut agama Islam. Sementara itu, sekitar 20,45 juta orang atau 7,47% menganut agama Kristen, 8,43 juta individu atau 3,08% menganut agama Katolik, dan 4,67 juta orang atau 1,71% menganut agama Hindu. Terdapat juga sekitar 2,03 juta individu atau 0,74% yang menganut agama Buddha, sekitar 73,63 ribu orang atau 0,03% menganut agama Konghucu, dan sekitar 126,51 ribu orang atau 0,05% yang mempraktikkan kepercayaan tradisional (dataindonesia, 2022).

Kebudayaan juga memainkan peran krusial sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia, serta memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan norma-norma kehidupan. Menurut Anas (dalam Handoyo, 2015), selama periode yang panjang, kebudayaan telah memberikan arah dan dinamika bagi gaya hidup masyarakat, yang berujung pada beragamnya pola hidup. Secara umum di Indonesia, terdapat empat corak pola hidup masyarakat pada masa lalu yang memiliki pentingnya dalam membentuk karakter nasional. Keempat corak pola hidup tersebut meliputi pola hidup masyarakat peramu, pola hidup masyarakat petani ladang, pola hidup petani sawah, dan pola hidup masyarakat pesisir (Handoyo, 2015).

Pola hidup yang membentuk identitas berbagai kelompok masyarakat di Indonesia ditandai oleh karakteristik pola hidup masyarakat di masa lalu, pada pola masyarakat peramu menurunkan karakter atau identitas masyarakat Indonesia yaitu enggan menonjolkan diri, gemar berkolaborasi atau bekerja sama,

bergotong-royong, memiliki kemampuan adaptasi, memiliki keyakinan pada hal-hal gaib, serta memiliki keyakinan dalam ikatan antara kehidupan dan alam baka. Pola hidup masyarakat yang tercermin dari pola hidup masyarakat petani ladang dan petani sawah meliputi rasa cinta pada asal-usul kampung halaman, sifat kekeluargaan, sikap produktif, semangat kebersamaan, serta sifat religius. Sementara itu, ketangguhan dalam berdagang, semangat berjuang, atau semangat bekerja keras menjadi ciri khas karakter masyarakat yang diwarisi dari masyarakat pesisir. Selain itu, adanya perbedaan dan kemajemukan pada masyarakat Indonesia juga membuat karakter masyarakat Indonesia memiliki loyalitas antar anggota kelompoknya, ataupun terhadap yang memiliki kesamaan identitas (Handoyo, 2015).

Selain itu, terdapat juga pengklasifikasian budaya suku bangsa Indonesia oleh Hildred Geertz (1961) menjadi tiga kelompok utama, yakni budaya masyarakat petani beririgasi, budaya pesisir yang dipengaruhi oleh keberadaan kebudayaan Islam, dan budaya masyarakat penggarap ladang serta pemburu yang masih menjalani gaya hidup berpindah tempat.

Keberagaman budaya, suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan sering dianggap sebagai fitur yang membedakan masyarakat majemuk (Nasikun, 1993). Dalam konteks politik, indikator yang paling mencolok dari sifat majemuk masyarakat Indonesia adalah ketiadaan kesepakatan bersama (*common will*). Seluruh masyarakat Indonesia terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain karena perbedaan ras. Dalam kerangka ini, setiap elemen cenderung menjadi sekelompok individu daripada menjadi kesatuan yang terstruktur, dan kehidupan

sosial mereka tidak sepenuhnya terpusat pada individu (Handoyo, 2015).

Sifat loyalitas kepada etnik atau suku bangsa dalam konteks negara multietnik bukanlah sesuatu yang sederhana. Secara umum, anggota suku atau etnik cenderung lebih setia kepada identitas suku atau etnik mereka sendiri daripada kepada entitas politik yang lebih besar, yaitu negara. Meskipun demikian, Koentjaraningrat adalah salah satu tokoh yang meyakini bahwa loyalitas masyarakat terhadap suku bangsa dan loyalitas terhadap negara bisa saling melengkapi, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia. Ia menyatakan pandangan positifnya bahwa loyalitas etnik dan loyalitas nasional dapat mendominasi dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan umum/publik (Koentjaraningrat, 1993).

Koentjaraningrat juga memberikan tiga contoh dalam sejarah nasional untuk mendukung pandangannya. Pada abad ke-7 M dan 8 M, dua kerajaan di Indonesia, yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatra Selatan dan Majapahit di Jawa Timur, berhasil mengintegrasikan secara sosial ekonomi, dan mungkin politik, negara-negara kecil yang sebelumnya bersaing satu sama lain.

Kedua, selama satu setengah hingga tiga setengah abad, penduduk Indonesia menjalani masa penjajahan oleh negara-negara Eropa Barat, terutama oleh Belanda, dan mengalami penderitaan yang serupa. Hal ini menyatukan mereka, mengesampingkan perbedaan suku. Ketiga, pada periode pergerakan nasional menuju kemerdekaan pada tahun 1920-an dan 1930-an, pemuda Indonesia menolak menekankan isu kesukubangsaan. Sebagai contoh, pada tahun 1928, mereka memilih bahasa Melayu, yang berasal dari suku bangsa kecil,

sebagai bahasa persatuan, bukan bahasa Jawa yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan oleh suku bangsa dengan jumlah penduduk terbesar.

### **2.1.2 Sosial Politik Negara Rusia**

Rusia, secara resmi dikenal sebagai Federasi Rusia, merupakan negara yang terletak di wilayah Eropa Timur dan Asia Utara. Dengan luas wilayah lebih dari 17 juta kilometer persegi, Rusia merupakan negara terbesar di dunia dan mencakup sebagian besar wilayah Eropa Timur dan sebagian besar Asia Utara. Ibu kota Rusia adalah Moskow, yang juga merupakan pusat politik, ekonomi, budaya, dan sejarah negara tersebut. Rusia memiliki sejarah yang kompleks dan panjang. Dalam hal geopolitik, Rusia memiliki pengaruh yang cukup besar di panggung internasional sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan anggota G20. Hubungan Rusia dengan negara-negara lain sering kali kompleks dan bervariasi, tergantung pada faktor-faktor politik dan ekonomi (detikedu, 2022).

Agama di Rusia sangat beragam dan mencerminkan keragaman budaya serta sejarah negara tersebut. Keragaman agama di Rusia sangat luas, beberapa agama yang ada di Rusia meliputi Kristen, Islam, Buddhisme, dan juga agama Yahudi. Kristen Ortodoks menjadi agama mayoritas di negara Rusia, dan Islam menjadi agama terbanyak kedua di negara tersebut. Dilansir dari iNews Pemasang, berdasarkan data survei dari Levada Center April 2022, terdapat sebanyak 71% responden yang mengaku bahwa mereka memeluk agama Kristen Ortodoks, 5% responden mengaku memeluk agama Islam, 3% memeluk agama lain seperti Katolik, Protestan, dan Buddha, serta 4% menyatakan Ateis (iNews Pemasang, 2022).

Selain keragaman agama, populasi masyarakat Rusia juga terdiri dari berbagai kelompok etnis. Sebagian besar penduduk berasal dari Uni Soviet dan saat ini, terdapat lebih dari 100 kelompok etnis yang berbeda. Kelompok terbesar adalah etnis Rusia yang mencakup sekitar 81,5 persen dari keseluruhan populasi Rusia. Sementara itu, terdapat juga kelompok etnis lain seperti Tatar (3,8 persen), Ukraina (3,0 persen), Chuvash (1,2 persen), Bashkirs (0,9 persen), Belarusia (0,8 persen), dan Mordovia (0,7 persen). Ada juga beberapa kelompok etnis lainnya, yang jumlahnya kurang dari 0,5 persen dari populasi masing-masing, seperti Armenia, Avar, Chechen, Jerman, Yahudi, Kazak, Mari, dan Udmurt (Viva, 2022).

Negara ini juga telah melalui berbagai fase politik, mulai dari Kekaisaran Rusia, Revolusi Bolshevik, hingga periode Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia kemudian beralih menjadi negara Federasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Pasca-era komunisme, Rusia memang mengalami proses perubahan yang signifikan, mulai dari runtuhnya Uni Soviet, upaya pemulihan ekonomi yang tidak berhasil di masa pemerintahan Boris Yeltsin dengan penerapan Shock Therapy, hingga kepemimpinan Gorbachev, terjadi transformasi dramatis dalam pemerintahan Rusia. Perubahan tersebut mengubah Rusia dari negara yang sangat kental oleh ideologi komunis bahkan menjadi jendela dunia untuk ideologi tersebut beralih menuju sistem yang demokrasi (Kemhan, 2013).

Demokrasi di Rusia selama beberapa dekade juga masih menciptakan ketidakjelasan, terutama pada masa Gorbachev di mana terjadi perubahan

signifikan menuju sistem demokrasi. Transisi ini berlanjut pada masa pemerintahan Yeltsin, yang terlihat melalui kebijakan ekonominya yang mencerminkan aspek-aspek demokrasi dan kapitalisme. Yeltsin melaksanakan privatisasi besar-besaran, menyerahkan sejumlah besar aset negara kepada masyarakat untuk dikelola, namun sayangnya, langkah ini malah berujung pada kebangkrutan yang luar biasa di Rusia pada periode tersebut (Rumi, 2013).

Kemudian demokrasi pada era pemerintahan Putin, presiden Rusia hingga saat ini, dari awal masa kepemimpinannya Putin telah menciptakan pola pemerintahan yang bersifat campuran meskipun unsur elemen demokrasi tetap ada di dalamnya. Meskipun demikian, secara substansial dapat dikatakan bahwa demokrasi di Rusia telah meredup. Model demokrasi Putin sebagian besar merupakan warisan dari Yeltsin yang kemudian dimodifikasi oleh Putin untuk memperkuat posisi eksekutifnya, dengan tujuan memperoleh akses yang lebih kuat dalam menangani kelompok-kelompok oligarki yang menguasai Rusia sebelumnya, baik pada masa Yeltsin maupun Gorbachev. Kurangnya kejelasan dalam demokrasi pada masa Putin tercermin dalam pendekatannya terhadap krisis di Chechnya dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap oposisi serta dunia jurnalistik, termasuk penutupan stasiun TV dan tindakan pembunuhan yang dihubungkan dengan Putin (Suwanti, 2015).

Beberapa ahli ekonomi mengungkapkan bahwa tingkat otoriterisme yang diadopsi oleh Putin sebagian besar dipengaruhi oleh masa pemerintahan Yeltsin. Yeltsin melaksanakan restrukturisasi dan privatisasi besar-besaran dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi Rusia melalui pendekatan berorientasi pasar. Hal ini



mengakibatkan penghapusan Gosnab dan Gosplan serta munculnya golongan masyarakat yang sangat kaya. Pada akhirnya, Putin harus menghadapi kelompok elit super kaya ini dengan menerapkan seleksi yang ketat, termasuk menumbangkan sejumlah oligarki dan mempertahankan individu yang dianggapnya dapat dipercaya. Hal ini terjadi dalam kasus Boris Berezovsky dan Roman Abramovich (Aditya, 2020).

Selama masa pemerintahan Putin, terjadi penurunan substansial yang signifikan dalam nilai-nilai demokrasi. Istilah 'Sovereign Democracy' sering digunakan untuk menggambarkan model demokrasi yang dijalankan Putin, yang sering dianggap sebagai upaya untuk menyembunyikan tindakan otoriter. Meskipun Putin sering menegaskan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Rusia, pada kenyataannya ia juga dikenal secara terang-terangan membatasi dan merusak nilai-nilai serta struktur demokrasi (Rizqianto, 2023).

Selama masa pemerintahannya, Putin melakukan transformasi dan revolusi terhadap setiap lembaga pemerintah yang memiliki potensi untuk menentangnya. Dalam kepemimpinannya, Rusia berubah menjadi negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin otoriter, meskipun masih mempertahankan label demokrasi. Salah satu tindakan yang dilakukan secara besar-besaran oleh Putin adalah pembatasan terhadap media, yang dipengaruhi oleh pengalamannya saat menjabat sebagai Perdana Menteri pada masa pemerintahan Yeltsin. Putin menyadari bahwa media, khususnya televisi, memainkan peran yang sangat vital dalam penyebaran ideologi, kebijakan pemerintah, serta dalam merendahkan oposisi,

yang akhirnya berdampak pada opini publik dalam pemilihan umum dan masyarakat pada umumnya. Hal ini mendorong pengambilan langkah untuk menurunkan nilai demokrasi dengan dominasi media oleh pihak eksekutif, yakni Putin, selama masa pemerintahannya. Contoh konkret hal tersebut dapat dilihat saat Putin menutup NTV, stasiun televisi yang sering mengungkap kasus korupsi di Rusia (Rumi, 2013).

Pada masa kepemimpinannya, Putin juga menggagas langkah kebijakannya yang terkenal dengan slogan "*Politic First, Economic Later.*" Dalam implementasinya, Putin menghadapi dan menyingkirkan segala bentuk oposisi, serta menyatakan perang terhadap oligarki, kelompok elit yang diciptakan pada masa kepemimpinan Yeltsin sebelumnya. Dalam pertempuran melawan oligarki ini, Putin menggunakan taktik-taktik yang dianggap kurang etis, seperti blackmailing dan ancaman-ancaman. Banyak dari oligarki yang dikalahkan kemudian melarikan diri ke luar negeri dan menyuarakan kritik terhadap Putin, menyebutnya sebagai sosok otoriter yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Namun, Putin membela tindakannya dengan alasan bahwa langkah-langkah tersebut didasarkan pada kepentingan nasional untuk melindungi aset-aset negara. Ia juga menuduh bahwa oligarki yang menolak untuk berkolaborasi dengannya sebagai pendukung Barat (Wibowo, 2013).

Salah satu bukti jauhnya nilai demokrasi pada kepemimpinan Rusia adalah terkait kasus Chechnya. Chechnya menjadi seperti rintangan yang sangat sulit diatasi bagi Putin, karena sejarahnya yang penuh konflik dan pertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sejak era Yeltsin, Rusia sudah terlibat dalam konflik

dengan Chechnya yang mendapat dukungan dari pihak Barat. Hal ini berdampak pada sikap Putin yang selalu menunjukkan sikap anti-Barat dalam setiap kesempatan berpidato atau memberikan komentar. Meskipun sebagian besar wilayah Chechnya sudah berada di bawah kendali Rusia, kelompok gerilyawan Chechnya terus berupaya melawan, termasuk menyerang helikopter Rusia menggunakan bazoka. Selain itu, pihak Chechnya secara terus-menerus menyebarkan video dan propaganda yang menentang Putin, terutama menampilkan helikopter atau pesawat yang dihancurkan tersebut, yang kemudian membuat Putin merasa kesal (Wibowo, 2023).

Dalam menangani isu Chechnya, Putin sering kali mengambil tindakan yang kemudian mendapat kritik dari pihak Barat. Setelah peristiwa World Trade Center (WTC), Amerika Serikat merasa memiliki dasar untuk melakukan serangan terhadap negara-negara yang dianggap teroris. Putin memanfaatkan situasi ini untuk menyerang Chechnya, dengan pihak Rusia terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap penduduknya, termasuk pembunuhan, penyiksaan, penculikan, peredaran senjata ilegal, dan bahkan perdagangan narkoba. Putin menggunakan serangan teroris pada September 2001 sebagai alasan untuk menyerang Chechnya, dengan mengaitkan Chechnya dengan jaringan Al-Qaeda sehingga memberikan dasar bagi Rusia untuk melakukan serangan. Namun, serangkaian pelanggaran hak asasi manusia di Chechnya pada akhirnya menjadi masalah bagi Putin (Rumi, 2013).

Pendekatan Putin terhadap Chechnya menunjukkan komitmennya terhadap pemeliharaan kesatuan wilayah Rusia. Dalam perspektif ini, nasionalisme Putin

didasarkan pada pertahanan teritorial yang ia sebut sebagai 'Patriotisme'. Tindakan untuk menjaga Chechnya, dengan segala pengorbanan, memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mencegah potensi disintegrasi yang dapat merambah ke wilayah lain di negara tersebut. Putin menjelaskan "Patriotisme" sebagai cinta terhadap tanah air, masyarakat, nilai-nilai agama, dan budaya yang membentuk identitas bangsa, yang harus dipertahankan dengan bangga. Dia menegaskan bahwa kehilangan patriotisme dan kebanggaan nasional akan mengancam eksistensi bangsa tersebut. Putin juga menekankan usaha untuk mengembalikan kejayaan Rusia di masa lampau (Wibowo, 2023).

Walaupun pemerintahan Rusia pada era Putin saat ini memiliki ciri yang otoriter, masyarakat Rusia tetap mendukung pemimpin mereka tersebut, selain itu mereka juga merasa "terbiasa" dengan sistem pemerintahan tersebut. Mereka lebih khawatir akan kembalinya situasi kacau seperti yang dialami pada era 1990-an, seperti salah satunya yaitu krisis ekonomi yang pernah mereka rasakan sebelumnya, sehingga mereka kurang mempedulikan apakah sistem yang diterapkan Putin bersifat demokratis atau tidak. Prioritas utama bagi masyarakat adalah kesejahteraan yang semakin meningkat dan prestasi internasional Rusia yang terus tumbuh di bawah kepemimpinan Putin. Mayoritas dari mereka sudah merasa jenuh dengan keleluasaan yang terlalu besar pada segala lapisan masyarakat. Konsep sentralisasi oleh Presiden Putin dianggap sebagai upaya untuk mengakhiri keleluasaan demokrasi dan membatasi gerakan ekstremis yang sering kali menggunakan alasan agama, budaya, atau faktor lainnya. Selain itu, kondisi negara tersebut yang juga multikultural, mereka merasa memang

dibutuhkan pemimpin yang otoriter untuk mengatur semuanya.

Krisis ekonomi yang terjadi di Uni Soviet telah menginisiasi pemikiran baru tentang arah kebijakan politik di negara tersebut. Dalam konteks kebijakan dalam negeri, gagasan baru ini tercermin dalam konsep '*Perestroika*' dan '*Glasnost*', yang tak terduga memicu runtuhnya Uni Soviet. Sebagai penerus pemerintahan Soviet, Rusia belajar dari peristiwa tersebut dan berupaya untuk memulihkan sistem kekuasaan yang terpusat serta mempertahankan integritas wilayahnya, bahkan jika itu berarti mengambil risiko merusak citra dan hubungan dengan negara-negara Muslim di seluruh dunia dan komunitas Muslim di dalam negeri (Nurasiah, 2022).

Dalam konteks kebijakan luar negeri, Rusia beralih dari pandangan hubungan dunia yang didasarkan pada ideologi dan lebih memfokuskan pada kekuatan militer. Hunter, seorang pengamat politik Rusia, menjelaskan bahwa evolusi pemikiran terkait kebijakan luar negeri Rusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, Uni Soviet kehilangan kemampuan ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi secara global dan internasional, serta tidak mampu bersaing dengan Barat secara total. Kedua, kegagalan tindakan politik Uni Soviet selama tahun 1980-an, seperti konflik di Afghanistan dan kesalahan perhitungan terkait arah dan hasil revolusi Islam di Iran yang disangka akan mendukung komunisme. Selain itu, kerugian dalam investasi di negara-negara dunia ketiga dan dampak negatif lainnya dari kebijakan luar negeri sistem komunis. Semua kondisi ini menjadi dasar yang kuat bagi Uni Soviet untuk mengubah doktrin hubungan luar negerinya, tidak lagi berbasis ideologis, dan lebih mengandalkan kekuatan militer

(Nurasiah, 2022).

Salah satu perubahan arah kebijakan yang dapat diamati adalah dalam hubungannya dengan Islam dan Muslim, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pemimpin Rusia memasukkan menteri Muslim ke dalam kabinetnya dan mengakui keberadaan Muslim Rusia. Presiden Vladimir Putin menegaskan komitmennya terhadap Islam dengan menghadiri acara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Malaysia pada tahun 2003. Langkah ini akhirnya membawanya menjadi pengamat tetap dan mendorong pembentukan Aliansi Peradaban Rusia-Islam melalui pertemuan pada 27-28 Maret 2006 dengan tokoh Islam dari 15 negara. Putin berharap partisipasi Rusia dalam OKI akan menghasilkan perkembangan lebih lanjut dan memperkuat hubungan Rusia dengan dunia Islam, mengingat aspirasi Muslim di Rusia untuk kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara Islam lainnya. Bahkan sebelumnya, Putin telah menunjukkan dukungannya terhadap Palestina dan mengutuk tindakan Israel (Nurasiah, 2022).

## **2.2 Sejarah Masa Kolonialisme Indonesia**

Kolonialisme adalah konsep yang merujuk pada upaya suatu negara untuk menguasai wilayah di luar batasnya, berasal dari kata "colonus" yang berarti menguasai. Tujuan utama kolonialisme adalah mencapai dominasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Motivasi utamanya muncul ketika sebuah negara superior secara

ekonomi dan militer berusaha menguasai wilayah yang kaya sumber daya alam. Proses ini seringkali berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dengan dukungan militer yang kuat. Sejumlah negara yang berhasil menerapkan kolonialisme mencakup Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris (Tirto, 2022).

Kolonialisme telah eksis dalam sejarah dunia sejak abad ke-15. Pada awalnya, bangsa Eropa mengendalikan wilayah dengan kekuatan politik, sistem militer, dan penguasaan yang solid. Namun, beberapa abad kemudian, konflik antar bangsa muncul akibat perbedaan kultur, budaya, keyakinan, dan hasrat dominasi, memicu konflik yang tidak dapat dihindari. Runtuhnya imperium barat, terutama penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani, menjadi salah satu contoh nyata dampak negatif bagi bangsa Eropa. Hal tersebut menyebabkan keruntuhan ekonomi dan perdagangan, terutama dengan munculnya revolusi industri yang bertujuan mengembangkan perekonomian (Fandy, 2020).

Revolusi industri sendiri mendorong Eropa untuk mengembangkan armada laut, seperti kapal besar, untuk menjelajahi samudra. Ekspedisi ini dimotivasi oleh tujuan menemukan sumber daya di negara lain, yang dipicu oleh misi Perang Salib. Upaya ini mengarah pada penemuan negara-negara dengan kekayaan alam melimpah tetapi sistem yang belum kuat, memicu ambisi Eropa untuk menguasai wilayah tersebut demi keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Dengan demikian, inilah titik awal perkembangan kolonialisme menjadi sebuah sistem yang tak terkendali oleh manusia (Fandy, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara produsen rempah-rempah yang paling dicari oleh bangsa asing sejak zaman dahulu, karena hampir semua sumber

daya alam di Indonesia termasuk dalam incaran mereka. Oleh karena itu, bangsa Eropa saling bersaing untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, termasuk di Indonesia. Beberapa faktor yang mendorong kedatangan mereka meliputi kemajuan pengetahuan dan teknologi, seperti penemuan kompas, teropong, dan peta. Pengaruh buku *Imago Mundi* karya Marco Polo tentang perjalanan ke Timur. Semangat mencari kekuasaan dengan prinsip 3G, yaitu Gold (mencari keuntungan dengan memiliki barang berharga), Gospel (penyebaran agama Kristen), dan Glory (mencapai kejayaan dengan memiliki banyak kekuasaan). Dan juga jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Faktor-faktor inilah yang kemudian mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia (Fandy, 2020).

### **2.2.1 Kedatangan Bangsa Portugis di Indonesia**

Sebagai pionir bangsa Eropa yang datang ke Asia, bangsa Portugis memulai hubungan perdagangan dengan tujuan untuk mengeksplorasi daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam untuk keperluan perdagangan. Perjalanan laut pertama yang dilakukan oleh Portugis dimulai dengan Bartholomeus Diaz pada tahun 1487, diikuti oleh Vasco da Gama yang diperintahkan oleh Raja Manuel I dari Portugis untuk menjelajahi samudra mencari Tanah Hindia. Meskipun awalnya mengira India sebagai penghasil rempah-rempah, mereka kemudian menyadari bahwa Malaka merupakan pusat perdagangan rempah-rempah setelah beberapa tahun tinggal di India. Rombongan berikutnya di bawah Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511, menguasai perdagangan di wilayah tersebut, dan melakukan ekspedisi



hingga mencapai Ternate pada tahun 1512. (Kompas, 2022).

Setelah berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511, Bangsa Portugis melanjutkan ekspedisi ke wilayah Maluku dengan tujuan utama memonopoli perdagangan rempah-rempah, khususnya di Ternate. Kedatangan mereka awalnya disambut baik oleh raja dan penduduk Ternate, bahkan memberi Portugis izin untuk mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan cengkeh. Namun, karena keserakahan Portugis dan penetapan harga cengkeh yang terlalu rendah, masyarakat Ternate mengalami penderitaan. Konflik pun tidak terhindarkan, dan akibatnya, Portugis terpaksa memindahkan kegiatan perdagangan mereka ke wilayah Nusa Tenggara (Kompas, 2022).

Beberapa faktor yang mempengaruhi bangsa Portugis melakukan penjelajahan, termasuk ke Indonesia, antara lain semangat Reconquista, keruntuhan Konstantinopel, dan kemajuan teknologi di wilayah Portugis. Reconquista merupakan semangat bangsa Eropa untuk melawan kekuasaan Islam secara global, juga sebagai upaya orang-orang Kristen di Spanyol Utara untuk merebut kembali kendali atas Spanyol dari penguasa Islam. Selain itu, kedatangan orang Portugis ke Nusantara dipengaruhi oleh jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel pada tahun 1453 M oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari Dinasti Turki Usmani. Konstantinopel dianggap strategis karena menjadi titik penghubung antara benua Asia dan Eropa serta sebagai jembatan budaya antara dunia Islam dan kebudayaan Eropa. Kemajuan dalam bidang perkapalan, geografi, dan astronomi di wilayah Portugis juga memberikan keahlian tambahan kepada orang Portugis, termasuk pengembangan

kapal yang lebih cepat dan memiliki keunggulan dalam perdagangan rempah-rempah (Rohim, 2017).

### **2.2.2 Kedatangan Bangsa Spanyol ke Indonesia**

Spanyol, sebagai negara Eropa, pernah melakukan ekspedisi ke Indonesia dalam rangka penjajahan, monopoli perdagangan rempah-rempah, dan pendudukan wilayah Nusantara. Ekspedisi ini disponsori oleh pemerintah Spanyol dan bertujuan untuk menemukan sumber rempah-rempah baru serta bersaing dengan Portugal yang memiliki ambisi serupa. Untuk mendukung ambisinya tersebut, Spanyol mengorganisir beberapa ekspedisi laut, yang dipimpin oleh penjelajah terkenal seperti Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan (Fandy, 2020b).

Christopher Columbus sendiri merupakan seorang nahkoda terampil yang juga dikenal sebagai pedagang dan penjelajah laut. Ia memiliki keyakinan bahwa rute tercepat menuju Asia Timur adalah dengan berlayar ke arah barat dan melintasi Samudra Atlantik. Meskipun awalnya mengalami kendala biaya, Columbus berhasil meyakinkan Ratu Isabella untuk mendanai ekspedisinya. Pada 3 Agustus 1492, Columbus memulai perjalanannya dengan tiga kapal dan 120 pelaut. Setelah berlabuh di Kepulauan Canary, mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat dan menemukan Kepulauan Salvador, yang ternyata adalah bagian dari Benua Amerika. Columbus melakukan empat perjalanan, mengeksplorasi wilayah seperti San Salvador, Hospinia (Dominika), Trinidad, Venezuela, Honduras, Panama, Meksiko, dan Santiago (Jamaica) (Kompas, 2021).

Magellan, seorang pejabat Spanyol keturunan Portugis, memiliki ambisi

serupa dengan Columbus untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah baru. Pada 10 Agustus 1519, ia memulai ekspedisinya dengan 165 awak kapal dalam 5 kapal berbeda. Bersama Kapten Juan Sebastian del Cano dan penulis Italia, Pigafetta, Magellan menjelajahi jalur ekspedisi Columbus melintasi Samudra Atlantik, pantai timur Amerika Selatan, ujung Benua Amerika, dan selat yang dinamai selat Magelhaens. Pada tahun 1521, mereka mencapai Kepulauan Massava, yang kemudian dinamai Filipina, dan Magelhaens memasang tugu peringatan sebagai klaim wilayah Spanyol. Meskipun menyebarkan agama di setiap tempat yang dikunjungi, Magelhaens menghadapi perlawanan di beberapa wilayah, termasuk dari orang Mactan di Filipina, yang menyebabkan kematiannya. Orang Spanyol yang tersisa meninggalkan Filipina dan berlayar ke Selatan. Dengan dua kapal yang tersisa, Victoria dan Trinidad, mereka akhirnya tiba di Maluku dan berhasil menemukan rempah-rempah (Fandy, 2020b).

Setelah kematian Magelhaens di Filipina, Kapten Juan Sebastian del Cano melanjutkan ekspedisi dalam pencarian rempah-rempah. Ekspedisi ini dikenal sebagai ekspedisi Magelhaens del Cano. Del Cano meneruskan perjalanan ke arah Selatan, melalui Kalimantan Utara, dan menemukan wilayah Tidore, Maluku. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mencapai Tidore, dan mereka juga singgah di sekitar wilayah Bacan dan Jailolo. Kedatangan Spanyol disambut baik oleh masyarakat Maluku, yang melihat mereka sebagai sekutu dalam perlawanan terhadap penjajahan Portugis di Indonesia. Keberhasilan Spanyol di Maluku mewujudkan impian mereka, memungkinkan mereka untuk bertransaksi dengan masyarakat Tidore. Namun, kedatangan Spanyol juga menimbulkan

perselisihan dan ancaman baru bagi Portugis, karena dianggap melanggar hak monopoli Portugis atas perdagangan rempah-rempah di Maluku (Muljana, 2008).

Pertarungan perdagangan rempah-rempah antara Spanyol dan Portugis terus berlangsung, dengan keduanya bersaing memperoleh dukungan dari kerajaan lokal, terutama Tidore dan Ternate. Persaingan ini memicu konflik yang semakin memanas antara kedua kerajaan lokal tersebut, di mana Spanyol, dengan bantuan Tidore, terlibat dalam konflik bersenjata melawan Portugis yang didukung oleh Ternate. Meskipun Portugis dan Ternate keluar sebagai pemenang, Spanyol tetap tidak menyerah dalam klaimnya terhadap Maluku, memicu kelanjutan konflik demi menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah ini. Untuk mengakhiri ketegangan, Perjanjian Saragosa disepakati pada 22 April 1529, di mana Spanyol menarik diri dari Maluku dan Portugis mendapatkan kembali monopoli perdagangan di sana. Isi perjanjian menetapkan bahwa Spanyol akan menghentikan aktivitasnya di Maluku dan berkonsentrasi pada perdagangan di Filipina, sementara Portugis dapat melanjutkan perdagangan di sekitar kepulauan Maluku. Setelah perjanjian ini, Spanyol kembali ke tanah airnya melalui rute barat, membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat melalui ekspedisi yang dianggap signifikan dalam sejarah manusia dan ilmu pengetahuan (Muljana, 2008).

### **2.2.3 Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia**

Pada 1596, Belanda, dipimpin oleh Cornelis De Houtman, tiba di pelabuhan Banten, menandai kedatangan pertama mereka di Nusantara. Namun, akibat perilaku kasar dan sombong mereka, penduduk pesisir Banten mengusir Belanda. Pada 1598, Belanda kembali ke Nusantara di bawah kepemimpinan

Jacob Van Neck dan Wybrecht Van Waerwyck dan mencapai kepulauan Maluku pada Maret 1599. Keberhasilan ekspedisi ini memicu minat berbagai perusahaan di Belanda untuk mengirimkan kapal-kapal mereka ke Indonesia. Pertumbuhan pedagang Belanda di Indonesia memicu persaingan di antara mereka sendiri serta dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris, yang sering kali berujung pada perampokan oleh bajak laut. Pada 20 Maret 1602, atas inisiatif Pangeran Maurits dan Johan Van Olden Barnevelt, Belanda mendirikan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Saat itu, terjadi persaingan ketat antara negara-negara Eropa untuk menguasai perdagangan di Asia Timur. VOC membuka kantor dagang pertamanya di Banten pada tahun 1602, dipimpin oleh Francois Wittert. Awalnya didirikan untuk kepentingan perdagangan, VOC berkembang menjadi entitas yang memonopoli perdagangan dan mengukuhkan kekuasaannya di berbagai wilayah Nusantara. Pada akhirnya, VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 (Fandy, 2020c).

Setelah kebangkrutan VOC, pemerintah Belanda mengambil alih kendali di Nusantara. Mulai 1 Januari 1800, Nusantara resmi menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Belanda dan dikenal sebagai Hindia-Belanda (Nederlands-Indie). Politik kolonial antara 1800-1870 berubah dari sistem perdagangan menjadi sistem pajak dan sewa tanah (*landelijk stelsel*). Meskipun Daendels (1807-1811) dan Raffles (1811-1816) awalnya mendukung prinsip liberalisme, tekanan dari negeri Belanda membuat mereka kembali ke sistem yang konservatif dan feodalistis, yang didukung oleh pemerintahan sentralistis dan feodalistis. Selama penjajahan Belanda di Nusantara, diperkenalkan sistem tanam paksa, atau yang dikenal

sebagai *cultuur stelsel*, oleh van den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini muncul karena kesulitan keuangan yang dihadapi pemerintah Belanda akibat Perang Jawa 1825-1830 di Indonesia dan Perang Belgia 1830-1831 di Belanda. Alasan utama penerapan sistem ini adalah beban finansial negara Belanda karena utang berat dan harapan untuk mendapatkan keuntungan besar dari koloninya, terutama Pulau Jawa. Dalam *tanam paksa*, rakyat Jawa harus membayar pajak *in natura* dalam bentuk hasil pertanian mereka. Van den Bosch berharap sistem ini akan menghasilkan tanaman perdagangan yang besar untuk diekspor ke Eropa dan Amerika, memberikan keuntungan besar bagi pemerintah dan pengusaha Belanda. Namun, pelaksanaannya sering menyimpang dan merugikan penduduk, meningkatkan beban hidup mereka (Aman, 2014).

Selain politik kolonial liberal dan politik kolonial etis, masa penjajahan Belanda di Indonesia juga ditandai dengan sistem yang dikenal sebagai *Divide et Impera*. Strategi ini digunakan oleh Belanda untuk menguasai suatu wilayah dengan memicu konflik di antara penguasa lokal dalam sistem kerajaan, atau dengan kata lain, melakukan *adu domba*. Taktik ini telah diterapkan sejak awal kedatangan Belanda di Indonesia, mulai dari era VOC hingga masa Hindia Belanda.

Meskipun Belanda menyatakan menghormati hak asasi manusia, pada kenyataannya di abad ke-17 tersebut, mereka sering menggunakan kebijakan *adu domba* untuk mempertahankan dominasinya di suatu daerah, terutama pada saat kekuasaan VOC. Strategi ini memungkinkan Belanda, yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada penduduk pribumi, untuk mengatasi pemberontakan dengan lebih

efektif. Politik pecah belah ini senantiasa menjadi langkah strategis Belanda dalam menangani pemberontakan di berbagai daerah di Nusantara, termasuk Perlawanan Pattimura (1817), Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Banjarmasin (1859-1863), Perang Bali (1846-1868), Perang Sisingamangaraja XII (1870-1907), dan Perang Aceh (1873-1906) (Aman, 2014).

## **2.3 Sejarah Hubungan Rusia-Indonesia**

### **2.3.1 Pra-Kemerdekaan**

Hubungan Indonesia dengan Rusia telah terjalin sejak zaman kerajaan di Indonesia bahkan sebelum kemerdekaannya. Menurut catatan dari pedagang Afanasy Nikitin dari kota Tver selama perjalanannya ke India (1466-1472), informasi mengenai negara misterius bernama Shabot di Asia Tenggara pertama kali diteruskan kepada orang Rusia, yang kemungkinan adalah Indonesia. Antara tahun 1846 hingga 1888, seorang peneliti antropologi Rusia bernama Miklouhu-Mclay juga telah melakukan ekspedisi ke Filipina, Papua Nugini, dan Papua, yang kini menjadi bagian wilayah Indonesia. Bahkan ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda, Kekaisaran Rusia menunjuk seorang konsul pertama, Modest M. Bakunin, di Batavia (sekarang Jakarta), yang menjabat pada periode 1894-1899. Uni Soviet juga memainkan peran penting selama periode 1945-1950 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dengan merespons positif terhadap kelahiran Indonesia sebagai negara merdeka dan mengutuk kolonialisme. Uni Soviet secara aktif mendukung Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan untuk menghentikan tindakan militer oleh Belanda dan mendorong pengakuan

internasional terhadap kemerdekaan Indonesia (Kemlu, 2018).

Pada awal 1920-an, Alexander Huber, lulusan Moskow College of Oriental Study, memulai penelitian sistematis tentang Indonesia, Filipina, dan Vietnam, yang kemudian dijadikannya dasar untuk menerbitkan buku berjudul "Indonesia, Sketsasial-Ekonomi" pada tahun 1932. Huber diakui sebagai orang pertama yang menggunakan istilah "Indonesia" dalam karya akademisnya, di zaman ketika wilayah tersebut masih dikenal sebagai Hindia Belanda, Hindia Timur, atau Holland Tropikan. Pada abad ke-20, Ernst Heinrich Haeckel, seorang sarjana Jerman, menulis "*Aus Insulinde*", karya yang menuai kritik dari Belanda karena dianggap pro-Indonesia. Ini mencerminkan kerjasama antara Indonesia dan Rusia yang sudah terjalin sejak lama, terutama dengan dukungan pertama dari Uni Soviet terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dukungan ini dipicu oleh kebijakan Uni Soviet yang menentang kolonialisme dan mendukung kelas pekerja di negara jajahan, menjadikan Rusia sebagai sekutu Indonesia pada masa itu. Hubungan ini mengalami berbagai dinamika sejak pra-kemerdekaan hingga era Orde Baru dan saat ini (Surya, 2009).

Sejarah kerjasama dan interaksi antara Rusia, sebelumnya dikenal sebagai Uni Soviet, dengan Indonesia memiliki keunikannya sendiri, berbeda dari hubungan Indonesia dengan negara lain. Kesamaan ideologis antara Indonesia dan Uni Soviet pada saat awal kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu alasan di balik kedekatan Indonesia dengan Rusia. Meskipun Uni Soviet telah runtuh dan digantikan oleh Federasi Rusia seperti sekarang, hubungan bilateral antara kedua negara tetap solid, mengikuti pola yang sama seperti pada periode awal



kemerdekaan Indonesia. Kedekatan antara Indonesia dan Uni Soviet mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Soekarno, meskipun saat itu fokus hubungan kedua negara masih terbatas pada bidang militer dan belum diperluas ke bidang lain (Surya, 2009).

### **2.3.2 Pasca Kemerdekaan**

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Rusia tetap menjadi salah satu pendukung utama Indonesia, yang ditunjukkan pada tahun 1945-1947 di PBB ketika Andrew Gromyko, tokoh utama dari Uni Soviet selama Perang Dingin, memimpin gerakan mengecam upaya Belanda mempertahankan penjajahan di Indonesia. Media Rusia turut aktif dalam menyebarkan liputan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, dengan slogan "Darahku Merah tak sudi dijajah" menjadi sorotan. Pada tahun 1948, Uni Soviet secara tidak langsung mengakui kemerdekaan Indonesia, yang kemudian diikuti dengan pengakuan resmi dan usulan pembukaan hubungan diplomatik antara Uni Soviet dan Indonesia pada tanggal 3 Februari 1950. Peristiwa ini menandai dimulainya hubungan diplomatik formal antara kedua negara (Kemlu, 2018). Pada masa Orde Lama, hubungan Indonesia dan Rusia berjalan harmonis, ditandai dengan kerja sama lintas berbagai bidang, terutama militer, pendidikan, dan budaya. Lebih dari 200 mahasiswa Indonesia belajar di universitas di Uni Soviet, sementara bantuan finansial dialokasikan untuk modernisasi persenjataan TNI dan pelatihan teknis. Karya sastra Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan diterbitkan di sana. Kesamaan ideologi dan tekad untuk melawan kolonialisme serta imperialisme menjadi landasan hubungan yang harmonis antara kedua negara. Presiden

Indonesia pada masa itu, Soekarno, melakukan empat kunjungan ke Uni Soviet, bertemu dengan Nikita Khrushchev, pemimpin Rusia saat itu, yang selalu menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat hubungan bilateral, termasuk dukungan di forum internasional (Ariana, 2016).

Kerjasama Rusia dan Indonesia dimulai saat Indonesia membutuhkan dukungan persenjataan untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Saat itu Amerika Serikat menolak permintaan bantuan, sehingga Uni Soviet memberikan bantuan persenjataan modern dan pelatihan militer senilai 1 miliar dolar AS, termasuk tank, kapal perang, pesawat tempur, dan senjata lainnya, untuk memodernisasi teknologi persenjataan Indonesia. Uni Soviet juga memberikan pelatihan teknis militer di akademi militer Moskow dan Leningrad serta mengirim 100 instruktur ke berbagai daerah di Indonesia (Lebang, 2010).

Dari kerjasama tersebut, kemudian melahirkan banyak kerjasama-kerjasama lainnya antar kedua negara. Bahkan tidak hanya dibidang militer, salah satu momen penting antara kedua negara juga dapat dilihat ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Rusia dan melihat Blue Mosque yang telah didirikan dari tahun 1910 terbengkalai dan hanya menjadi gudang. Soekarno yang melihat hal tersebut meminta Nikita Khrushchev mengembalikan masjid tersebut kepada muslim. Rusia yang menghormati Presiden Soekarno akhirnya mengabulkan permintaan tersebut (SindoNews, 2022).

Sayangnya, hubungan antara Rusia dan Indonesia mengalami pembekuan selama masa Orde Baru setelah tragedi 1965 di Indonesia. Pada saat itu, pemerintah Indonesia lebih cenderung mendukung negara-negara Barat karena

fokus utamanya adalah pembangunan ekonomi. Hal ini membuat Uni Soviet, yang memiliki sikap anti-Barat, menjaga jarak dengan Indonesia. Selain itu, kebijakan politik negara-negara Barat untuk menahan pengaruh komunis semakin membatasi hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet serta sekutunya. Namun, hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet mulai membaik pada tahun 1989 ketika Presiden Soeharto melakukan kunjungan resmi ke Uni Soviet yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Selama kunjungan tersebut, kedua pemimpin negara menandatangani pernyataan persahabatan dan kerjasama bilateral. Keruntuhan Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin membawa dampak signifikan pada perubahan peta politik internasional, termasuk hubungan antara Indonesia dan Rusia. Pada tanggal 28 Desember 1991, Indonesia secara resmi mengakui Federasi Rusia sebagai negara penerus Uni Soviet, menandakan perbaikan hubungan setelah periode pembekuan yang panjang. Sejak itu, hubungan kedua negara terus membaik dan semakin dekat, dengan semakin banyak kerja sama yang dilakukan (Surya, 2009).

### **2.3.3 Hubungan Masyarakat Indonesia-Rusia Kontemporer**

Hubungan masyarakat Indonesia dan Rusia di era kontemporer telah menunjukkan perubahan kedekatan yang sangat terasa. Hal ini tidak dapat terlepas dari kontak sejarah panjang yang telah terjalin antara Indonesia dan Rusia sejak dulu (Kemlu, 2022). Maka dari itu ini juga mempengaruhi kedekatan hubungan antar masyarakatnya bahkan hingga sekarang. Selama ini Indonesia sendiri di Rusia aktif mengadakan acara pertemuan dengan pemuda di Rusia agar bisa mencintai dan mengenai Indonesia. Ini terbukti dari berlangsungnya pertemuan di

taman KBRI Moskow yang telah berlangsung hingga sekarang. Pada pertemuan ini KBRI Mosko mengajarkan mengenai budaya dan Bahasa Indonesia kepada pemuda-pemuda di Rusia (Kemlu, 2020). Hal ini secara tidak langsung menumbuhkan rasa ketertarikan dari masyarakat Rusia terhadap Indonesia.

Tidak hanya itu, kedekatan hubungan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Rusia sekarang ini juga dapat terlihat dari penggunaan istilah keluarga yang digunakan oleh masyarakat Rusia dan Indonesia. Menurut Machdalena, penggunaan istilah keluarga yang sama antara Rusia dan Indonesia ini menunjukkan hubungan kedekatan dan cerminan budaya bangsa yang telah melekat antara Indonesia khususnya di Bali dan Rusia (Machdalena, 2014).

Kedekatan interaksi antara masyarakat Indonesia dan Rusia ini juga dapat terlihat dari adanya kerjasama antara komunitas masyarakat muslim Rusia dengan komunitas muslim Indonesia yang telah meliputi diberbagai bidang seperti wisata religi, pendidikan, labelisasi, bahkan hingga musana muslim (Kementerian Agama RI, 2019). Bahkan umat Islam Rusia dianggap begitu menghormati Indonesia dan menganggap bahwa Indonesia adalah saudara (Detik News, 2022). Hal ini dikarenakan Islam dianggap menjadi salah satu factor kedekatan hubungan masyarakat Rusia dan Indonesia hingga sekarang. Lantaran mengingat bahwa islam menjadi agama mayoritas kedua di Rusia. Kedekatan atas dasar agama ini membuat interaksi antar masyarakat di kedua negara ini cukup kuat.

Interaksi masyarakat antar kedua negara ini juga tentunya tidak dapat terlepas dari hubungan kedekatan secara politis antara Indonesia dan Rusia. Kedekatan antara kedua negara ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa

monumen yang dibangun antara kedua negara sebagai bentuk kedekatan hubungan diplomatik. Misalnya saja pada tahun 2021 didirikan patung Yuri Gagarin Kosmonot Uni Soviet yang mana ini menjadi manusia pertama yang ada di ruang angkasa. Patung ini diresmikan langsung oleh Anies Baswedan dimana dibangun di Taman Mataram Jakarta. Bahkan menurut Anies Baswedan, patung ini menjadi makna bagaimana eratnya hubungan warga Jakarta dan Rusia (Kemlu, 2021). Bahkan Duta Besar Rusia Untuk Indonesia yakni Lyudmila Vorobieva berniat untuk membangun patung presiden pertama Indonesia yaitu Sukarno di Moskow. Bahkan patung ini akan di dirikan di salah satu taman paling terkenal di Moskow dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai karya seni di Rusia di berbagai era. Pembangunan patung ini menjadi bentuk simbol kedekatan antara Rusia dan Indonesia serta menjadi perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antar kedua negara pada tahun 2025 (Liputan6, 2023)